



TERUNGKAP DI PERSIDANGAN PUNGLI RUTAN KPK

Tahanan Dilarang Sholat Jumat



Jakarta, MIMBAR - Jaksa menghadirkan Dono Purwoko, terpidana kasus korupsi proyek pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai saksi kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Dono mengaku pernah dilarang Jumat karena belum bayar setoran bulanan.

"Tapi yang jelas saya mengalami ketika sebelum dipanggil itu, Jumat itu saya nggak bisa. Jadi ini menurut saya ini adalah satu indikasi bahwa akan ada kerepotan-kerepotan atau masalah-masalah ketika nanti menjalani berproses hukum menghadapi masalah saya ini," kata Dono di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024). Dono mengatakan, dirinya juga melakukan protes karena tak diperbolehkan Jumat. Protes itu disampaikan Dono dengan teman satu kamarnya yakni mantan pejabat Pajak, Wawan

Ridwan. "Jadi sebelum saudara membayar, saudara tidak boleh Jumat begitu?" tanya jaksa. "Saya pernah mengalami itu, saya protes waktu itu dengan Pak Wawan Ridwan, satu kamar. Kok kita nggak boleh," jawab Dono. Dia menyampaikan protes itu ke petugas Rutan KPK. Dono menuturkan dirinya akhirnya diperbolehkan keluar dari ruang tahanan untuk mengikuti Jumat usai melakukan protes.

■ Bersambung ke Hal 11



PENGAMANAN PON 2024

Kapolda Sumut Cek Posko K3I Satgas Walrolakir

Medan, MIMBAR - Polda Sumatera Utara terus meningkatkan pengamanan dalam menciptakan situasi kamtibmas kondusif selama berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

28 SAFAR 1446 H

Subuh : 05:04 WIB	Maghrib : 18:33 WIB
Zuhur : 12:28 WIB	Isya : 19:42 WIB
Ashar : 15:35 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Partai Tersandera

Oleh Dr A Rasyid, MA

PARTAI politik menjadi instrumen sentral dan strategis dalam sebuah sistem demokrasi—kala kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Tanpa parpol, pilar demokrasi pincang, oleh karenanya, salah satu ciri sistem demokrasi ialah keberadaan parpol. Di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila,

■ Bersambung ke Hal 11

Puting Beliung Terjang Taput

1 TEWAS DAN 8 LUKA

Tapanuli Utara, MIMBAR - Hujan deras disertai dengan angin puting beliung menerjang Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut), hingga membuat delapan rumah warga rusak. Selain itu, seorang warga dinyatakan tewas dan delapan orang lainnya mengalami luka-luka.

"Dalam hal itu, ada delapan rumah warga yang rusak dan satu orang meninggal dunia, delapan luka ringan," kata Kasi Humas

Porles Taput Aiptu Walpon Baringbing, Senin (2/9/2024). Walpon menyebut peristiwa itu terjadi di Dusun Lumban Holbung, Desa Bahal Batu III, Kecamatan Siborongborong, kemarin sore. Saat hujan dan puting beliung itu, warga memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu, korban yang tewas dan korban luka-luka itu tengah berkumpul di salah satu rumah milik Toni Sihombing untuk membahas

■ Bersambung ke Hal 11



SIKAPI MUKTAMAR TANDINGAN

PKB Ancam Tempuh Jalur Hukum

Jakarta, MIMBAR - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Zainul Munasichin mengultimatum akan menempuh jalur hukum kepada pihak-pihak yang tetap berkukuh menggelar muktamar tandingan PKB. Ia menegaskan hal tersebut merupakan

tindakan ilegal karena PKB pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah disahkan pemerintah. "Kalau ada yang menggelar muktamar itu, baik Lukman Edy (eks Sekjen PKB), atau siapapun itu maka kita akan persoalkan secara hukum. Karena ini sudah termasuk tin-

dakan inkonstitusional," kata Zainul kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/9). Zainul menjelaskan hanya ada satu Muktamar PKB, yakni yang digelar di Bali pada akhir Agustus lalu.

■ Bersambung ke Hal 11

Jokowi-Prabowo Kompak Singkirkan Anies

Oleh: TONY RASYID

DARI Jawa Barat ke Jakarta, tentu ada perhitungan. Meski di Jawa Barat hampir pasti menang, Ridwan Kamil justru pilih Jakarta. Kenapa? Ada jaminan akan dimenangkan. Oleh siapa? Tentu oleh kekuasaan. Tepatnya tangan kekuasaan. Siapa penguasanya? Joko Widodo dan Prabowo Subianto.



Jokowi dan Prabowo sepakat dan satu kata: Anies Baswedan harus dilenyapkan. Tidak boleh ada panggung buat Anies. Bagaimana cara melenyapkan Anies? Lakukan operasi terhadap partai-partai yang akan usung Anies.

Hanan Supangat digeledah rumahnya, dan jadi tersangka. Kader Nasdem ini jadi pintu masuk. Dari sini, anak Surya Paloh dibidik.

Semula, Surya Paloh ngotot ingin calonkan Anies di Pilgub

■ Bersambung ke Hal 11

Komisi X DPR RI Minta Anggaran Pendidikan Diaudit



Jakarta, MIMBAR - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta Kemendikbudristek untuk menggelar audit dengan sejumlah pihak yang memperoleh 20 persen anggaran Pendidikan dari APBN.

■ Bersambung ke Hal 11



■ Keterlalu...!!
■ Ckckck...

Puting Beliung...

Dari Halaman 1

soal persiapan pesta keluarga mereka pekan depan.

"Korban yang meninggal dunia dan yang luka ringan keseluruhannya berkumpul di satu rumah karena persiapan ada pesta keluarga hari Rabu depan," ujarnya.

Lalu, saat tengah berkumpul itu, tiba-tiba pohon pinus yang berada di samping rumah tersebut tumbang dan menghancurkan rumah itu. Akibatnya, korban Dimpos Sihombing (37) tertimpa pohon di bagian kepala dan meninggal dunia.

Sementara delapan korban lainnya terkena ranting pohon dan hanya mengalami luka ringan.

"Untuk rumah-rumah yang lain yang mengalami

kerusakan itu diakibatkan angin puting beliung dan kerusakannya pun ringan," sebutnya.

Adapun rincian pemilik rumah yang rusak adalah Toni Sihombing (35), Jampiter Sihombing (50), Darwin Sihombing (50) Fitner Sihombing (67), Lindu Aritonang (40), Rina Rihombing (50), Ropita Purba (45) dan Hotman Sihombing (55). Mereka merupakan warga Desa Bahal Batu III.

Sementara data korban luka-luka adalah Sabungan Sihombing (55), Pantur pasaribu (45), Risma Sihombing (45), Demi Sihombing (9), Roniata Sihombing (27), Ririn Pasaribu (9), Yumi Pasaribu (13) dan Jasa Yandos Sihombing (23). (det/js)

PKB Ancam...

Dari Halaman 1

Muktamar ini telah mengesahkan Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB lagi.

Karenanya, ia menekankan semua forum muktamar yang digelar di luar muktamar PKB di Bali adalah ilegal dan inkonstitusional.

"Makar secara politik. Aparat penegak hukum wajib membubarkan muktamar itu. Kalau mereka melaksanakan muktamar itu ya ditangkap saja. Karena mereka sudah melanggar UU parpol dan UU Pemilu. Itu tindak pidana. Karena itu ga ada alasan untuk mereka untuk menggelar," ujar dia.

Zainul pun mengatakan Lukman Edy cs tak memiliki kekuatan hukum untuk menggelar muktamar tandingan PKB. Ia menegaskan Lukman Edy sudah bukan lagi pengurus, kader, dan anggota PKB.

"Terus atas dasar apa menggelar muktamar? Karena pengurus PKB hasil muktamar Bali sudah disahkan Kemenkumham. Jadi sudah enggak ada celah lagi bagi mereka untuk mengganggu PKB, apalagi menggelar muktamar," kata dia.

Cak Imin menyindir rencana Lukman Edy yang ingin menggelar Muktamar PKB tandingan sebagai proyek lima tahun sekali. "Proyek 5 tahunan," cuit Cak Imin di

akun X (Twitter) @cakimi-Now.

PKB telah menggelar Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Minggu (25/8). Pada muktamar itu, Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi.

Eks Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan Muktamar PKB tandingan diklaim siap digelar dan tinggal menunggu arahan dan petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Lukman mengatakan sudah melapor kepada pimpinan PBNU Yahya Staquf Cs terkait rencana muktamar. Ia pun menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.

"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," kata Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (1/9).

"Selanjutnya mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," tambahnya.

Lukman pun mengaku tak setuju dengan hasil Muktamar PKB yang memilih Cak Imin kembali sebagai ketua. Ia bahkan menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepemimpinan DPP PKB hasil Muktamar Bali. (cnni/js)

Hidayah

Partai Tersandera

Dari Halaman 1

parpol satu-satunya lembaga yang diakui Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen oleh MPR pada 1999-2002 untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum (Pasal 6A ayat 2 dan Pasal 22E ayat 3).

Posisi itu membuat parpol begitu kuat dan berkuasa. Terlebih, parpol juga satu-satunya lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik baik di tingkat daerah maupun pusat melalui pemilu. Hampir semua pimpinan dan anggota komisi negara diseleksi oleh parpol yang masuk atau lolos ke DPR.

Begitu besar kekuatan parpol. Ironisnya, peran dan fungsi mereka tidaklah segenggang-sepenarian dengan harapan masyarakat. Parpol justru menunjukkan banyak wajah kebobrokan, salah satunya praktik korupsi.

Sebenarnya rakyatpun tidak bisa berharap banyak atas keberadaan Partai Politik, sebab keberadaan partai tersebut tidak lain adalah sebagai merebut kekuasaan atau ajang mencari duit, bukan untuk membela kepentingan rakyat, meskipun mereka sudah duduk dikursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Karena itu tidak salah juga penilaian Anies Baswedan bahwa kondisi partai politik di tanah air sedang tersandera kekuasaan, sehingga tidak mampu lagi bersikap idelis untuk bangsa dan negara.

Awal-awalnya pendirian partai itu diakui dilakukan dengan niat ikhlas untuk

berjuang demi rakyat, tetapi begitu di perjalanan maka arah dan tujuan partai menjadi berubah dengan sendirinya, sesuai dengan kondisi politik yang ada dan nego-nego yang terjadi.

Anies Baswedan menilai partai-partai politik yang ada di tanah air seperti sudah tersandera oleh kekuasaan. Istilah ini barangkali tidak beda jauh seperti kerbau dicucuk hidungnya : artinya menurut saja kehendak orang lain tanpa membantah karena bodoh atau karena tidak berdaya melawan.

Fenomena buruk yang diduga kuat terjadi pada partai politik di tanah air saat ini sama seperti yang terjadi zamannya orde baru yang dipaksa manut dengan kehendak kekuasaan. Kekuatan Parpol di DPR tidak seperti di negara lain yang mampu impeachment Presiden jika berada di jalan yang tidak benar.

Rakyat juga sesungguhnya harus hati-hati menyalurkan aspirasi politik ke partai, karena bila partai tersebut menyimpang dari kebenaran, boleh jadi juga rakyat akan ikut memberikan pertanggungjawaban kelak di yaumul mahsyar yakni hari berkumpulnya semua makhluk, termasuk manusia, jin, dan lainnya, di Padang Mahsyar. Peristiwa ini terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur. Pada saat itu segala rekam jejak kita di dunia yang baik dan yang buruk akan dipertontonkan dan dipertanggungjawabkan. Surat Al Muddassir Ayat 38 artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Helikopter Angkut Turis Jatuh di Rusia

17 Jenazah Ditemukan

Rusia, MIMBAR - Para petugas penyelamat Rusia menemukan 17 jenazah setelah sebuah helikopter yang mengangkut 22 orang,

yang sebagian besar turis, terjatuh di area Semenanjung Kamchatka di Timur Jauh Rusia.

Seperti dilansir AFP, Senin

(2/9/2024), otoritas regional Rusia sebelumnya melaporkan helikopter jenis Mi-8 itu hilang tak lama setelah lepas landas dari sebuah pangkalan dekat area Gunung Api Vachkazhets pada Sabtu (31/8) waktu setempat.

Helikopter itu disebut membawa 22 orang, yang terdiri atas 19 penumpang yang semuanya turis dan tiga awak.

Gubernur Kamchatka Vladimir Solodov dalam pernyataan video via Telegram menyebut para petugas penyelamat melihat keberadaan puing-puing helikopter tersebut di area perbukitan pada ketinggian 900 meter, Ahad (1/9) pagi.

Semenanjung Kamchatka

merupakan area yang populer di kalangan turis karena keindahan alamnya. Area itu kerap menjadi tujuan wisata petualangan yang populer karena gunung berapi aktif dan alamnya yang masih asli.

Kamchatka diketahui berjarak lebih dari 6.000 kilometer sebelah timur Moskwa dan berjarak 2.000 kilometer sebelah barat Alaska, yang merupakan wilayah Amerika Serikat (AS).

Rekaman video yang diambil dari udara, yang diposting oleh Kementerian Urusan Darurat Rusia, menunjukkan puing-puing helikopter berserakan di area lereng dekat puncak bukit yang dikelilingi hutan lebat. (det/js)



Kapolda Sumut...

Dari Halaman 1

Setibanya di lokasi, Irjen Pol Whisnu Hermawan langsung mengecek kesiapan Posko Satgas Walrolakir yang bertugas dalam mengamankan pelaksanaan PON 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara.

Melalui Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan Posko K3I Satgas Walrolakir bertugas untuk memberikan pengamanan selama berlangsung PON 2024. Seperti pengawalan kepada seluruh atlet dan official, mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas serta mencegah gangguan kamtibmas.

"Posko Satgas Walrolakir melakukan monitoring seluruh rangkaian kegiatan PON 2024 serta merespon dengan cepat apabila terjadinya

gangguan kamtibmas," katanya.

"Kapolda Sumut hari ini mengecek seluruh personel yang bertugas di Posko Satgas Walrolakir dan melihat simulasi pengamanan dan semua siap menjalankan seluruh tugasnya," terang mantan Kapolres Biak Papua tersebut.

Hadi mengungkapkan, Polda Sumut tengah menggelar Operasi Kepolisian Hatra Toba 2024 dalam mengamankan dan menyukseskan perhelatan PON 2024 di Kota Medan, Sumatera Utara.

"Dalam mendukung pengamanan itu sebanyak 61 titik lokasi diselenggarakannya PON 2024 telah dipasang kamera CCTV yang terhubung langsung dengan Posko K3I Satgas Walrolakir," ungkapnya. (A-10)

Komisi X...

Dari Halaman 1

terkait anggaran pendidikan karena sebagian besar anggaran pendidikan tidak dikelola langsung oleh Kemendikbudristek," ungkap Dede dalam keterangannya, dikutip Senin (2/9/2024).

Perlu diketahui, anggaran pendidikan tahun 2023 dari APBN 2023 yang terealisasi hanya Rp 513,38 triliun dari total anggaran sebesar Rp 621,28 triliun. Di mana, sebagian besar anggaran pendidikan tersebut dialokasikan bukan untuk Kemendikbudristek melainkan ke daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 346,56 triliun atau 52,1 persen.

Penempatan anggaran pendidikan lainnya masuk melalui Pembiayaan termasuk Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) yakni sebesar Rp 15 triliun, di bawah wewenang Kementerian Agama. Selanjutnya, sebanyak Rp 47,31 triliun disebarkan ke beberapa kementerian atau Lembaga yang memiliki program pendidikan.

Berkaca dari laporan yang Dede terima, bersama anggaran pendidikan tersebut berbanding terbalik dengan minimnya kondisi layanan

pendidikan. Sehingga, hal ini memunculkan kesenjangan akses pendidikan, serta guru dan tenaga pendidik belum memperoleh kesejahteraan yang layak. Akibat serentetan permasalahan tersebut, Komisi X DPR membuat Panja Pembiayaan Pendidikan.

Melalui panja tersebut, Dede berupaya mendorong reformulasi kebijakan anggaran pendidikan Indonesia. Menurutnya, upaya reformulasi ini akan mendorong agar dampak dari anggaran pendidikan bisa menciptakan pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkeadilan di Indonesia.

"Panja Pembiayaan Pendidikan akan berusaha membuat rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah supaya kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bisa lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, Kemendikbudristek tidak bisa berdiri sendiri bekerja, akan kami dorong agar antar kementerian menguatkan koordinasi seperti dengan Kementerian keuangan, Bappenas, dan kementerian lembaga lainnya yang mengelola anggaran fungsi pendidikan," tutupnya. (det/js)

Tahanan Dilarang...

Dari Halaman 1

"Karena belum bayar, terus untuk beribadah Jumat juga dipersulit gitu?" tanya jaksa.

"Iya, walaupun akhirnya dikeluarkan," jawab Dono.

"Tapi saudara rutin membayar?" tanya jaksa.

"Setelah pertama kali membayar, bulan berikutnya saya rutin," jawab Dono.

DIDAKWA RP 6,3 MILIAR

Sebelumnya, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55

Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain," ujar jaksa.

Berikut 15 terdakwa kasus ini:

1. Deden Rochendi
 2. Hengki
 3. Ristanta
 4. Eri Angga Permana
 5. Sopian Hadi
 6. Achmad Fauzi
 7. Agung Nugroho
 8. Ari Rahman Hakim
 9. Muhammad Ridwan
 10. Mahdi Aris
 11. Suharlan
 12. Ricky Rachmawanto
 13. Wardoyo seluruhnya
 14. Muhammad Abduh
 15. Ramadhan Ubaidillah
- (det/js)

Muktamar PKB...

Dari Halaman 1

"Terus atas dasar apa menggelar muktamar? Karena pengurus PKB hasil muktamar Bali sudah disahkan Kemenkumham. Jadi sudah enggak ada celah lagi bagi mereka untuk mengganggu PKB, apalagi menggelar muktamar," kata dia.

Cak Imin menyindir rencana Lukman Edy yang ingin menggelar Muktamar PKB tandingan sebagai proyek lima tahun sekali. "Proyek 5 tahunan," cuit Cak Imin di akun X (Twitter) @cakimiNow.

PKB telah menggelar Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Minggu (25/8). Pada muktamar itu, Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi.

Eks Sekjen PKB Lukman Edy mengatakan Muktamar PKB tandingan diklaim siap digelar dan tinggal menunggu arahan dan petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Lukman mengatakan sudah melapor kepada pimpinan PBNU Yahya Staquf Cs terkait rencana muktamar. Ia pun menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.

"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya," kata Lukman dalam keterangan resmi, Minggu (1/9).

"Selanjutnya mari kita menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan harus dilaksanakan. Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," tambahnya.

Lukman pun mengaku tak setuju dengan hasil Muktamar PKB yang memilih Cak Imin kembali sebagai ketua. Ia bahkan menyurati Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar menolak pengesahan kepemimpinan DPP PKB hasil Muktamar Bali. (cnni/js)